

**Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029**

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET.
<p>Mewujudkan konektivitas yang efektif dan efisien dalam mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang berkelanjutan</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Materi muatan/substansi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila</li> <li>2. UUD 1945</li> <li>3. UU Nomor 25 TAHUN 2004M tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga</li> </ol>	<p>Materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 telah mengacu dan memperhatikan pada beberapa Peraturan Menteri lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud telah dinyatakan selesai harmonisasi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-4073 tanggal 10 Oktober 2025</p>